

**TATA KELOLA DESTINASI WISATA PANTAI BATU WARNA DI KOLBANO (STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGELOLA WISATA PANTAI BATU WARNA DI DESA SPAHA, KECAMATAN KOLBANO, KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN)**

**Selin Nabuasa<sup>1</sup>, Yeftha Yerianto Sabaat<sup>2</sup>, Boli Tonda Baso<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik  
Universitas nusa cendana

Email: [selinnabuassa20@gmail.com](mailto:selinnabuassa20@gmail.com)

---

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :25-08-2025

Revised :10-09-2025

Accepted :19-09-2025

**Keywords:** Governance,  
Tourist Destination,  
Participation.

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

**ABSTRACT**

*The management of Kolbano Beach destination in Spaha Village is located in South Central Timor Regency and has great tourism potential with the beauty of unique colored rocks. For its good and beneficial development, comprehensive and sustainable governance is needed. Kolbano Beach can also be improved so that it can provide economic and social benefits that develop for the people of Spaha Village and its surroundings as well as public awareness. The problem studied in this study is the management of Kolbano tourism managed by the local community without the intervention of the Village government, where until now Kolbano tourism has not developed as seen from its management itself. The method used is a qualitative descriptive method because researchers can obtain direct statements from informants regarding someone's experiences, opinions, feelings and knowledge about something. Although there is no government intervention, the government has taken the initiative to provide information related to Kolbano tourism through print media and electronic media such as: website, Youtube, FB, IG and Tik Tok. From the results I got, Kolbano tourism management has a lot of time to plan how tourism development in Spaha Village can strengthen cooperation and improve quality human resources.*

## ABSTRAK

Tata kelola destinasi Pantai Kolbano di Desa Spaha berlokasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan memiliki potensi wisata yang besar dengan keindahan batuan berwarna-warni yang unik. Untuk perkembangannya secara baik dan bermanfaat, diperlukan tata kelola yang komprehensif dan berkelanjutan. Pantai Kolbano juga dapat ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkembang bagi masyarakat Desa Spaha dan sekitarnya serta adanya kesadaran masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yakni pengelolaan wisata Kolbano di kelola oleh masyarakat setempat tanpa campur tangannya pemerintah Desa yang dimana sampai sekarang wisata Kolbano belum adanya perkembangan yang dilihat dari pengelolaannya itu sendiri. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif karena peneliti dapat memperoleh pernyataan langsung dari informan mengenai pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu. Walaupun tidak adanya campur tangan pemerintah namun, pemerintah berinisiatif untuk menyediakan informasi terkait wisata Kolbano melalui media cetak, dan media elektronik seperti: website, Youtube, FB, IG dan Tik Tok. Dari hasil yang saya dapat yaitu Pengelolaan wisata Kolbano memiliki banyak waktu dalam merencanakan bagaimana perkembangan wisata di Desa Spaha agar lebih memperkuat kerja sama serta meningkatkan SDM yang berkualitas.

## PENDAHULUAN

Tata kelola destinasi wisata adalah sebuah pariwisata yang tidak dapat dipisahkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata tersebut mulai dari pengelola, kebijakan pemerintah Desa, dan masyarakat Desa dalam mengelola objek wisata di Pantai Kolbano, Tata kelola juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya baik bagi Manusia atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan Tertentu. Tata kelola yang baik (*Good Governance*) di Desa harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar pemerintah Desa bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing Desa. Artinya dengan pengelolaan yang baik, pemerintahan Desa bisa punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah desa juga tahu kemana arah yang akan dituju serta memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan Desa. Tata kelola yang baik akan dapat meningkatkan daya saing Desa.

Wisata tersebut akan diatur dan dipantau oleh Negara memiliki sejumlah alasan penting yang di mana adanya peran Negara yang kuat dalam tata kelola destinasi wisata,

diharapkan Desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tetap lestari dari segi lingkungan dan budaya. Serta memberikan pedoman bagi pengelolaan Desa wisata untuk berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Negara dapat memberikan dukungan pendanaan dan bantuan teknis untuk mengembangkan Desa wisata melalui alokasi dana dan program pembangunan dari pemerintah, dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan meningkatkan pariwisata.

Pihak pemerintah Desa juga akan terlibat dalam pengembangan Destinasi wisata dari Pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tata kelola desa wisata seperti: Pemerintah Desa dan Masyarakat lokal terdapat beberapa pihak yang mengelola Desa wisata yang memiliki peran penting dalam pengelolaan desa wisata seperti adanya tanggung jawab atas pembuatan kebijakan, perizinan, pengawasan dan pendanaan untuk pengembangan Desa wisata. Masyarakat lokal juga sangat penting dalam mengelola desa tersebut mereka dapat terlibat dalam pengambilan keputusan, pengembangan produk wisata, menjaga kebersihan wisata Desa melalui partisipasi masyarakat lokal, Desa wisata dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa dan pengunjung. Dan yang dikelola yaitu penataan wisata.

Destinasi wisata harus melibatkan semua masyarakat Desa agar lebih mengetahui bagaimana membangun wisata dengan membuat kebijakan yang baik agar dapat memfasilitasi pertumbuhan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial dan memiliki nilai kemanusiaan dalam membangun Tata kelola wisata yang baik. Potensi wisata selayaknya dikelola semaksimal mungkin agar wisata tersebut bisa membawa dampak positif bagi para pengunjung, Tata kelola yang baik dapat diukur melalui beberapa faktor yaitu, budaya positif komunikasi konstruktif dan komunitas yang terlibat, transparan dan akuntabilitas, visi dan kepemimpinan, penerimaan dalam keberagaman (toleransi), mengembangkan pengetahuan, belajar dan berbagi keahlian, peran dan tanggung jawab peserta yang jelas, struktur operasional yang jelas dan proses diluar jaringan agar masyarakat Desa tersebut bisa melihat bahwa wisata memiliki banyak manfaat dan keunikan dalam mengelola bersama pihak pemerintahan.

Manfaat dari wisata pantai Kolbano tersebut memiliki sumber daya seperti : batu warna, dan perikanan masyarakat dikelola dengan baik Perkembangan Tata kelola destinasi wisata Pantai Kolbano sejak Tahun 2017 - 2024 masih belum ada perubahan yang di mana adanya campur tangan Pemerintah dalam membangun tata kelola destinasi wisata dengan baik.

Pantai batu warna di Kolbano, ini sangat penting bagi masyarakat Desa serta para pengunjung karena memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan pariwisata dengan adanya tata kelola yang baik, destinasi wisata dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, budaya, atau sumber daya alam setempat. Adanya pengembangan model Tata Kelola Terbaik yang juga dapat menghasilkan model yang akan di terapkan ke destinasi wisata lainnya. Dengan mempelajari kesuksesan dan tantangan yang dihadapi Desa Spaha maka model ini dapat

diadaptasi dan diimplementasikan di destinasi lain untuk meningkatkan pengelolaan pariwisata secara keseluruhan. Dan juga adanya peningkatan kesejahteraan Masyarakat lokal melalui penelitian ini, dapat dikembangkan strategi yang memastikan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata. Dengan melibatkan masyarakat setempat, destinasi wisata dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar bagi mereka. Penelitian tentang tata kelola destinasi wisata di Desa Spaha tidak hanya memberikan wawasan yang berharga untuk pengelolaan pariwisata di daerah tersebut, tetapi juga dapat menjadi contoh dan panduan bagi destinasi wisata lainnya dalam upaya menuju pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

Tata kelola dari aspek administrasi Desa wisata melibatkan peran organisasi tata kelola dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Organisasi tata kelola destinasi pariwisata menjadi fokus bagi akademisi karena konsep ini menjadi pilihan utama dalam mengelola potensi wisata. Bentuk atau jenis tata kelola destinasi sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing destinasi wisata. Selain itu, analisis tata kelola desa wisata melibatkan evaluasi struktur, mekanisme, dan praktik yang digunakan dalam pengelolaan pariwisata di suatu desa. Aspek-aspek yang dianalisis meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, kordinasi, dan akuntabilitas.

Wisata Pantai Kolbano termasuk dalam wilayah administrasi desa Kolbano, Namun pada tahun 2014 terjadi pemekaran Desa Kolbano sehingga wisata Pantai Kolbano masuk dalam Wilayah administrasi Desa baru yaitu Desa Spaha, sesuai dengan hasil wawancara Bapak Camat Kolbano "dipahami bahwa sebelumnya Desa Spaha itu mekar wilayah tersebut termasuk dalam Desa Kolbano, nah selama ini Masyarakat luar kenal bahwa pantai Kolbano itu ada disitu tetapi kemudian Desa Kolbano Mekar Menjadi Desa Spaha maka objek Wisata itu ada di wilayah Desa Spaha.

Tata kelola dari Aspek ekonomi destinasi wisata dalam Pengembangan Wisata Pantai Kolbano di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ODTW ( objek daya tarik wisata) Pantai Kolbano yang dapat meningkatkan ekonomi lokal masyarakat di desa tersebut agar dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal masyarakat. Adapun peningkatan pendapatan ODTW Pantai Kolbano di Desa Spaha dianggap mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui sektor pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, terdapat peluang untuk meningkatkan perekonomian desa melalui berbagai aktivitas ekonomi terkait pariwisata.

Dengan adanya aspek politik destinasi wisata di Desa Spaha, maka dapat dilihat dari aspek politik seperti adanya partisipasi masyarakat yang sangat menentukan dalam pengembangan desa wisata, agar tidak terlepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat dan terjadi penurunan kualitas lingkungan, sehingga dalam pengelolaan pariwisata akan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera seiring dengan kelestarian alam. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik pada intinya adalah adanya koordinasi antara pemangku kepentingan yang ada serta keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan antara pihak

pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Wujud partisipasi masyarakat terkait yaitu mengawasi dan mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pengembangan kepariwisataan, mengidentifikasi sumber daya yang dilindungi dan dikembangkan serta dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik.

Aspek politik memainkan peran penting dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan keterlibatan pemerintah yang dimana peran pemerintah daerah dalam mengatur kebijakan, regulasi, dan pengawasan terhadap pengelolaan pariwisata di Desa. Keterlibatan pemerintah dapat menciptakan kerangka kerja yang jelas dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan melihat uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Tata Kelola Destinasi Pantai Batu Warna Di Kolbano ( Studi Partisipasi Masyarakat dalam mengelolah wisata pantai batu warna Di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan)”**.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survei yakni tujuan dari peneliti deskriptif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari program pemerintah dalam mengelola objek wisata alam di Desa Spaha Kecamatan Kolbano, dasar penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi faktual dan yang mendetail di lapangan terhadap objek penelitian yang ada hubungannya dengan permasalahan.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkapkan pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi dan kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang telah diperoleh dari lapangan baik secara langsung melalui wawancara, maupun tidak langsung melalui bahan tertulis dan observasi saat penelitian mengenai tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Kecamatan

Kolbano. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan destinasi wisata Pantai batu warna secara berkelanjutan yang difokuskan pada tata kelola pariwisata yang dibagikan dalam beberapa bagian sub topik yaitu, pengelolaan,transparansi,akuntabilitas,dampak positif, dampak negatif dan partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan potensi tata kelola destinasi wisata Kolbano.

Subjek dari destinasi wisata Pantai batu warna tersebut di kelola oleh perorangan atau sekelompok orang itu sendiri, "Ibu Odi Kase" selaku pengelola wisata tersebut bersama anak-anak pantai yang selalu mengambil kesempatan untuk melayani wisatawan dalam membeli batu dan mengambil post foto. Sumber informasi yang saya dapatkan terkait destinasi tersebut adalah : Toko adat, masyarakat lokal pengrajin batu warna dan toko adat.

Objeknya itu di pantai kolbano yang dimana melihat dari kerja sama antara pihak masyarakat dan pemerintah masih kurang adanya pengembangan wisata tersebut, sesuai hasil yang saya dapatkan dari pihak yang mengelola wisata tersebut bahwa untuk sementara waktu mereka berusaha untuk menjaga wisata tersebut sambil memikirkan bagaimana kerja sama pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mengerti dengan Tata kelola destinasi wisata tersebut. Adanya peran masyarakat, pemerintah dan peran swasta yang dapat dijelaskan bahwa setiap masyarakat mereka dapat terlibat dalam pengelolaan secara langsung melalui kelompok sadar wisata akan tetapi kelompok ini belum ada di pantai kolbano maka dari itu harus adanya peran pemerintah dalam perencanaan dan pengaturan infrastruktur dan penegakan aturan terkait pengelolaan wisata tersebut. Pemerintah juga perlu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam pengelolaan wisata berkelanjutan. Pihak swasta berperan aktif juga sebagai investor dalam pengembangan infastruktur dan fasilitas wisata, pengembangan produk serta promosi wisata.

Di Pantai Kolbano memiliki regulasi dan pengawasan termasuk peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan wisata tersebut yang dilihat dari izin usaha, pengelolaan lingkungan dan perlindungan budaya agar bisa menguntungkan masyarakat setempat. Tata kelola destinasi wisata Kolbano dapat menguntungkan bagi pihak masyarakat, swasta, dan pengusaha setempat yang dilihat dari penjualan batu warna tersebut bisa menambah kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

### **Tata Kelola Wisata Destinasi Pantai Kolbano**

Tata kelola wisata adalah proses pengelolaan dan penyelenggaraan destinasi wisata yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dan pengunjung. Tata kelola wisata bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tata kelola atau *good governance* secara umum ialah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Tata kelola objek wisata Pantai dapat meningkatkan perekonomian suaru Negara melalui beberapa aspek penting yaitu: meningkatkan pendapatan masyarakat dan

daerah, menciptakan lapangan kerja serta menumbuhkan kesadaran masyarakat. Selain itu, tata kelola wisata juga perlu menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan, yaitu: pendekatan yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan dan masyarakat lokal.

Destinasi Wisata Pantai di Kolbano, memiliki banyak potensi ekonomi bagi masyarakat lokal terkait dengan pengelolaan batu warna yang bisa menambah pendapatan kebutuhan mereka. Pariwisata juga menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu daerah yang mana sektor pariwisata dapat menjadi perhatian atau kerja sama agar pengelolaan terkait tata kelola di Desa Spaha Kecamatan Kolbano bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kunjungan wisatawan di Pantai Kolbano tersebut biasanya sangat padat yang artinya kalau pada hari-hari libur atau setiap hari sabtu dan minggu itu akan memambah pemasukan bagi masyarakat yang menjual, anak-anak yang berprofesi sebagai tukang foto, dan ada yang mencari batu warna untuk dijual ke para pengunjung.

Pengembangan Destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Kecamatan Kolbano ini menjadi aktor utama yang menata SDA dan SDM masyarakat lokal tentunya membutuhkan keterlibatan dari pemerintah setempat tetapi dari pihak yang menjaga dan mengelola wisata tersebut menolak kerja sama dari pemerintah.

Berdasarkan hasil maka Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan Mengenai Tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano, Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku Kepala Desa Spaha beliau menyatakan bahwa:

*"baik adik terkait dengan tata kelola destinasi wisata pantai batu warna di Kolbano ini merupakan salah satu pariwisata yang memiliki banyak sekali potensi bagi masyarakat dan wisata yang sangat menarik banyak pengunjung serta terakit dengan batu warna ini digolongkan sebagai galian C Namun, wisata tersebut sampai dengan saat ini kami selaku pemerintah setempat tidak tahu bagaimana perkembangan pengelolaan wisata pantai sudah sampai mana. Karena yang mengelola wisata tersebut adalah masyarakat yang menolak kerja sama dari kami, Karena menurut mereka wisata Pantai tersebut berada dekat dengan mereka."*

Pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Zakaria Sabuna selaku Sekertaris Desa Spaha beliau menyatakan :

*"adik untuk tata kelola destinasi wisata pantai batu warna sampai saat ini kami dari pihak pemerintah masih mempertimbangkan bagaimana agar melakukan kerja sama dengan masyarakat mengelola untuk lebih meningkatkan pembangunannya namun, masih ada pro dan kontra maka kami juga masih mempertimbangkan keadaan."*

Dari hasil wawancara di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa, Tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna Kolbano sampai saat ini masih belum adanya peningkatan yang di mana masyarakat yang menjaga wisata tersebut tidak mengijinkan dari pihak pemrintah atau pihak lain untuk mencampur tangan dalam kesejahteraan destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano.

## **Pengelolaan Destinasi Wisata Pantai Batu Warna di Kolbano**

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan mengenai bagaimana pengelolaan destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano, Hal tersebut dapat dilihat dari wawancara yang disampaikan oleh Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku Kepala Desa Spaha beliau menyatakan bahwa:

*“Nah untuk pengelolaannya sementara yang mengelola wisata tersebut bukan kami dari pihak pemerintah tetapi orang-orang yang tinggal berdekatan dengan wisata tersebut, mereka mengklaim bahwa pantai itu milik mereka jadi mau bagaimana pun mereka tetap mengelola. Kami dari pihak pemerintah setempat juga tidak pernah untuk konsultasi dengan pihak yang mengelola terkait bagaimana perkembangan Destinasi wisata Pantai”*

Pernyataan yang berbeda namun substansi yang sama disampaikan oleh Ibu Odi Kase selaku masyarakat yang mengelola wisata Pantai kolbano menyatakan bahwa:

*“baik kaka untuk pengelolaan wisata Pantai Kolbano ini yang di kelola itu saya sendiri dan juga untuk pembangunannya juga saya yang mengurus semua tanpa ada campur tangan dari siapa pun begitu pula dari pemerintah setempat”.*

Pendapat lain yang disampaikan oleh Bapak Zakaria Sabuna selaku Sekertaris Desa Spaha beliau menyatakan :

*“adik untuk pengelolaan di wisata Pantai batu warna ini, pemerintah belum melakukan pengelolaan apapun karena dari kami pemerintah sudah melakukan atau meminta kerja sama dengan orang-orang yang menjaga wisata tersebut namun mereka tidak menerima kami untuk menjalin support dalam pengelolaan destinasi wisata”*

Pernyataan yang berbeda namun substansi yang sama disampaikan langsung dari Bapak Mateos Kase Selaku Tua adat di Desa Spaha beliau menyatakan :

*“menurut saya sebagai tua adat di Desa Spaha terkait dengan pengelolaan Destinasi wisata batu warna, belum ada kemajuan atau upaya dalam meningkatkan aspek pengelolaan di bidang pariwisata karena yang mengelola tidak menijinkan pihak lain untuk bekerja sama.”*

Dari hasil wawancara di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, adanya perbedaan kesepakan hak dan tanggung jawab antara pihak pemerintah dan pihak yang mengelola Wisata Pantai Kolbano yang di mana wisata tersebut tidak akan diperhatikan oleh pemerintah setempat karena masyarakat tidak di ijinakan untuk menjalin kerja sama. Pantai wisata Kolbano untuk tingkat pengunjung sangat padat dan juga pemasukan juga sangat banyak yang dimaksud biaya parkir serta penjualan batu warna di pinggiran pantai ini dikerjakan oleh pihak yang menjaga dan para masyarakat sekitar. Wisata tersebut sampai sekarang di kelola oleh masyarakat itu sendiri.

## **Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Batu Warna Kolbano**

Kegiatan pariwisata merupakan proses pengembangan yaitu memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Penting juga dalam mendorong kegiatan ekonomi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan peluang kerja. Memperdayakan masyarakat pesisir tidak seperti memperdayakan kelompok-kelompok masyarakat lain karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat antara lain masyarakat nelayan dan

usaha pariwisata. Potensi-potensi wisata yang terdapat di Desa Spaha didukung oleh fasilitas-fasilitas agar berkembang lebih optimal menjadi sebuah kawasan wisata.

Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan wilayahnya. Dalam Pengembangan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Setiap organisasi yang dibentuk di setiap daerah baik resmi maupun tidak resmi harus mengelola potensi dan sumber daya yang terdapat di daerah tersebut untuk mencapai tujuan internal dan eksternal organisasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku kepala Desa Spaha menyatakan bahwa:

*“kalau berbicara terkait perkembangan Destinasi wisata pantai batu warna, proses perkembangan itu belum maksimal hal ini memang karena kurangnya keterbatasan anggaran dan juga dari pihak masyarakat yang mengelola tidak mau untuk adanya pihak lain yang mau bergabung untuk sama-sama membangun wisata tersebut.”*

Pernyataan yang berbeda namun substansi yang sama disampaikan oleh Ibu Mince Lette selaku pengrajin batu warna dan juga masyarakat Desa Spaha berpendapat bahwa:

*“saya sebagai pengrajin batu warna yang setiap hari aktivitasnya di pinggiran pantai ini melihat perubahan atau perkembangan dari wisata ini Namun, menurut saya Adik, memang ada perubahan tetapi itu di luar campur tangan pemerintah maka situasi pengelolaannya masih sangat kurang.”*

Pernyataan yang berbeda namun substansi yang sama disampaikan oleh Ibu Odi Kase selaku penjaga atau yang mengelola Pantai wisata menyatakan bahwa:

*“terkait dengan perkembangan wisata Pantai Kolbano dan juga fasilitas yang sudah saya kerjakan mulai dari memperbaiki kamar mandi/wc, lopo-lopo dan juga listrik serta tempat bersantai bagi para pengunjung dan juga pagar, pengelolaannya sudah saya lakukan dengan baik yang di mana anggrannya itu saya mengambil dari setiap kali saya memungut uang parkir. Nah dari uang parkir tersebut saya mengelola dengan baik bagaimana cara agar bisa mengembangkan Destinasi wisata menjadi salah satu wisata yang bermanfaat, akan tetapi untuk fasilitasnya sampai saat ini belum memadai 100% yang artinya saya yang mengelola masih memikirkan untuk bisa menambah fasilitas serta menjaga kelestarian di pantai ini.”*

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa, Perkembangan destinasi wisata Pantai Kolbano masih kurang pengawasan dari pemerintah yang di mana harus adanya pihak pemerintah untuk menyelesaikan semua permasalahan terkait pengelolaan wisata tersebut. Maka dari itu pihak pemerintah harus memberikan solusi agar bisa bekerja sama untuk meningkatkan Destinasi wisata Pantai yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Spaha dan masyarakat luar.

Dalam pengembangan pariwisata ada beberapa hal dibicarakan yaitu pengembangan fasilitas di tempat pariwisata dan juga pengembangan sumber daya manusia (SDM).

## **Pengembangan Fasilitas Wisata**

Pengembangan fasilitas wisata adalah upaya untuk meningkatkan potensi pariwisata suatu kawasan dengan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas wisata. Pengembangan wisata yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengunjung dan mengantisipasi penurunan jumlah pengunjung.

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Spaha Kecamatan Kolbano, peneliti menemukan bahwa untuk pengembangan wisata dan juga fasilitasnya masih kurang memadai tidak adanya faktor pendukung dari pemerintah secara serius untuk melakukan pengembangan. Hal ini karena belum ada pendekatan dari pemerintah daerah untuk saling bekerja sama dalam membangun fasilitas pendukung di Pantai Kolbano tetapi untuk pengembangan dari tahun 2022 –sekarang wisata tersebut sesudah diresmi dan dikelola oleh masyarakat yang berada dekat dengan wisata namun belum maksimal. karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh pihak yang mengelola wisata.

Beberapa fasilitas yang berada di wisata Kolbano yaitu: penginapan yang nyaman, kamar mandi/wc, rumah makan dan tempat duduk yang santai bagi para pengunjung.

Pengembangan pariwisata tersebut adalah proses strategi yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik, kualitas keberlangsungan destinasi wisata. Ini melibatkan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki infrastruktur, fasilitas dan layanan yang tersedia bagi para wisatawan, serta mempromosikan destinasi tersebut di pasar domestik dan internasional. Untuk saat ini pengembangan tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Kecamatan Kolbano belum ada peningkatan potensi objek wisata Kolbano karena itu milik masyarakat setempat. Namun setelah peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat atau pengrajin batu warna mereka menyampaikan bahwa pengembangan destinasi wisata ini harus adanya kerja sama dari pemerintah Desa mau pun pemerintah dinas pariwisata supaya adanya partisipasi dari mereka agar wisata bisa berkembang dan bisa dimaksimalkan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

## **Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM)**

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Desa Spaha Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengan Selatan ( TTS) peneliti menemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) masih sangat kurang perlu ditingkatkan untuk pengembangan destinasi wisata di Desa tersebut yaitu : kepala Desa dan masyarakat perlu bersinergi untuk mengembangkan Destinasi wisata serta adanya pengabdian masyarakat harus dilakukan pelatihan pembuatan kerajinan tangan seperti, memiliki ide kreatif untuk membuat mainan kalung dari batu warna yang ada di pinggiran Pantai.

Dalam tata kelola destinasi wisata Pantai Kolbano terkait pengembangan sangat penting dengan adanya pengembangan itu mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat terkait peningkatan potensi yang ada, tata kelola yang baik atau *good governance*, adalah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama yang dilihat dari

bagaimana pemerintah mengambil salah satu cara untuk bisa meningkatkan proses keberlanjutan pengembangan Destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano karena sampai saat ini belum ada kemajuan.

Dalam konteks tata kelola pengembangan pariwisata, agar tata kelola bisa berkembang maka destinasi wisata tersebut dapat terlaksanakan dengan baik. Maka aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam tata kelola pariwisata tersebut harus menjalankan prinsip-prinsip *Good Governance* dengan baik. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang dimaksud dalam penelitian :

### 1) Transparansi

Transparansi adalah konsep dan prinsip yang mendasari dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Dalam konteks tata kelola pengembangan destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Kecamatan Kolbano, Transparansi pengelolaan harus dilakukan sehingga ada keterbukaan informasi dengan kepariwisataan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Spaha dalam tata kelola pengembangan destinasi wisata, sejauh ini pemerintah sudah menjalankan tugas serta menawarkan kerja sama dengan pihak yang mengelola wisata tersebut, Namun masih adanya kendala dalam bekerja sama.

Hal ini bisa dilihat dari wawancara kepada Bapak Faslat P.Y Sabuna Selaku Kepala Desa Spaha menyatakan bahwa:

*"baik kaka terkait dengan papan informasi tentang Desa Spaha sampai sekarang juga tidak ada, ini yang menjadi pertanyaa kenapa..? jadi kami dari pemerintah setempat hanya bisa memposting semua informasi dimedia sosial tentang aktivitas wisatawan serta pemandngan Pantai Kolbano serta kegiatan yang terajdi di wisata tersebut agar masyarakat luas bisa lebih mengenal lebih lanjut tentang Pantai Kolbnao. walaupun tidak ada kerja sama dengan pihak yang mengelola tetapi kami membantu agar wisata kita bersama bisa lebih di kenal banyak orang , dan kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin agar dari pihak yang mengelola memberikan ruang bagi kami untuk bisa melakukan kerja sama salam membangun Destinasi wisata Kolbano bersama-sama."*

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Yorim Kase selaku Nelayan dan Pengrajin batu warna di wisata Pantai Kolbano menyatakan bahwa:

*"kami sebagai masyarakat biasa,Nelayan,pengrajin batu warna untuk lebih mengetahui terkait semua pengurusan Destinasi wisata serta bagaimana pengelolaannya kami sampai sekarang tidak tahu karena informasi-informasi dari Desa atau yang mengelola wisata tidak memberitahukan kepada kami. Jadi, pada saat ada para pengunjung yang datang dan melihat kami sedang bekerja di pinggiran laut otomatis mereka selalu bertanya menyangkut destinasi wisata dan kami menjawab sesuai apa yang kami tahu tentang perkembangan wisata Kolbano sekarang ini."*

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Zakaria Sabuna selaku Sekertaris Desa Spaha menyatakan bahwa:

*"untuk sementara papan informasi tentang anggaran belum ada karena kami dari pihak pemerinta tidak diijinkan untuk menjalin kerja sama dengan pihak yang mengelola wisata Pantai batu warna."*

Dapat disimpulkan bahwa dari hasil wawancara ketiga narasumber di atas, dari pendapat mereka menjelaskan tentang transparansi atau keterbukaan anggaran dan informasi tentang pariwisata di Desa Spaha. Dapat dimengerti bahwa ketika mengkaji lebih dalam para narasumber sudah menjelaskan substansi dari transparansi dalam tata kelola pengembangan Desa Spaha yang di mana papan informasi tentang destinasi wisata dan anggaran tidak memadai. Dalam konteks transparansi pengguna anggaran dalam kegiatan pariwisata dan informasi-informasi terkait Destinasi wisata belum terlaksana dengan baik sampai sekarang, hal ini karena tidak adanya kerja sama antara pemerintah setempat.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan untuk memperatanggungjawabkan tindakan, keputusan, atau hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Dalam konteks tata kelola pengembangan pariwisata Desa Spaha akuntabilitas sangat penting untuk menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas dalam pengelolaan Destinasi wisata.

Berkaitan dengan akuntabilitas tata kelola pengembangan pariwisata di Desa Spaha dapat dijelaskan dalam wawancara oleh Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku Kepala Desa Spaha menyatakan bahwa:

*"Nah adik untuk wisata Desa Spaha ini, berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaannya saya tidak tahu karena yang mengelola wisata tersebut bukan dari kami pemerintah. Sementara ini juga kami masih berusaha bagaimana agar bisa mendekati pihak pengelolaan wisata untuk bekerja sama dalam hal meningkatkan destinasi wisata yang bermanfaat"*

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Bapak Mateos Kase selaku Tua adat di Desa Spaha menyatakan bahwa :

*"dari saya sendiri selama ini tidak tahu bagaimana perkembangan wisata tersebut, memang wisata berdekatan dengan kami namun, untuk pengelolaannya kami sama sekali tidak tau saya berharap kedepan pemerintah bisa menjadi pihak utama dalam perkembangan dan pengelolaan wisata tersebut"*

Pendapat lain disampaikan oleh Bapak Yefron Kase selaku Masyarakat Desa Spaha menyatakan bahwa:

*"Wisata pantai batu warna memang memiliki banyak ketertarikan yang membuat para pengunjung untuk datang dan bersenang-senang Namun, yang saya lihat ini dari pengelolaan sampai ke bagaimana pemerintah beradaptasi pada pihak yang menjaga wisata ini belum ada kemajuan untuk mengelola bersama agar bisa melihat perkembangannya sudah seberapa persen".*

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu odi kase selaku pengelola wisata Pantai batu warna menyatakan bahwa:

*"jadi baik untuk Akuntabilitasnya banyak para pengunjung yang datang untuk berpiknik yang di mana semua terkait dengan uang karcis,Wc/kamr mandi, lopo, kelapa mudah, dan persiapan jual beli seperti makanan dan minuman serta penginapan saya sudah sediakan agar para wisatawan bisa merasa nyaman, nah untuk pemerintah saya sendiri menolak kerja sama karena pernah dari pemerintah yang datang untuk menjalin kerja sama tetapi habis dari sini mereka*

*pulang dan sampai sekarang tidak kembali kesini lagi, dan terkait pagar yang sementara di kerjakan ini saya memakai dana dari pungutan biaya parkir setiap kalau ada pengunjung yang datang "*

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka Peneliti dapat menyimpulkan dari hasil ketiga narasumber selain pihak yang mengelola menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam tata kelola pengelolaan destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano ini adalah bentuk pertanggung jawaban dari pihak Desa akan tetapi masyarakat setempat yang menjadi pihak dalam pengelolaan wisata tersebut. Sampai sekarang masyarakat tidak tahu perkembangan wisata tersebut prosesnya sudah sampai mana.

Peneliti juga menyimpulkan dari hasil narasumber oleh Ibu Odi Kase selaku pengelola wisata Pantai, Tata kelola pengelolaan wisata Pantai batu warna ini saya sudah berusaha untuk bagaimana menjaga dan merawat dari segi kebersihan dan infrastrukturnya nah, untuk pengelolaannya dan perubahan sudah ada bisa dilihat dari wisata yang selalu bersih, lopo-lopo yang sudah ada sekitar 5 rumah (lopo), wc dan juga pagar yang sekarang dalam proses pembuatan.

#### **Kurangnya kerja sama antara Pemerintah Desa dan Pihak yang mengelola wisata.**

Destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Kecamatan Kolbano, dapat menjadi kendala dalam pengembangan Tata kelola, salah satu masalah utama adalah kurangnya keterbukaan dari pihak pengelola wisata tersebut untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal perkembangan Tata Kelola wisata Pantai. Pengelolaan wisata tersebut memiliki banyak sekali potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan dengan baik tetapi dari pihak yang mengelola menolak kerja sama maka terjadinya perbedaan pendapat terkait tata kelola destinasi wisata yang masih kurang dalam berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan ide dan peluang yang meningkatkan pariwisata yang berkelanjutan. Kurangnya koordinasi dari pemerintah Desa Spaha juga akan menjadi dampak negatif dan positif terkait tata kelola pengelolaan destinasi wisata Pantai batu warna di Kolbano. Peneliti melihat bahwa adanya keterbatasan dalam pengembangan infrastruktur dan layanan yang kurang memadai untuk menarik perhatian para wisatawan, dan juga adanya dampak positif dan dampak negatif yang tidak memperkuat pengelolaan wisata tersebut oleh pemerintah setempat.

Peneliti menyimpulkan terkait kerja sama pemerintah dan pihak yang mengelola, ia sangat mempertahankan pengelolaan wisata dengan alasan karena mata pencaharian mereka itu adalah wisata Pantai Kolbano. Maka dari itu dari pihak mana pun yang mau menawarkan kerja sama tetapi mereka menolak secara tidak menghargai.

Berkaitan dengan kerja sama tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna Kolbano dari pemerintah dan pihak yang mengelola bisa dilihat dari hasil wawancara dari Ibu Odi Kase selaku pengelola Wisata Kolbano menyatakan bahwa:

*"saya sendiri yang mengelola wisata ini jadi, terkait pihak pemerintah yang mau datang untuk menjalin kerja sama saya akan tetap menolak karena kalau adanya campur tangan dari pemerintah maka kebutuhan ekonomi kami akan berkurang. Dengan adanya wisata yang saya jaga ini bisa*

*menambah kebutuhan ekonomi dan kebutuhan anak-anak saya jadi kalau pemerintah mau campur tangan ya jangan semuanya mereka yang atur harus libatkan saya juga, Tapi untuk sekarang saya belum bisa mengizinkan pihak lain mengikut campur dalam wisata ini."*

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara oleh Ibu Odi, terkait kerja sama ini maka wisata sampai sekarang tidak ada pihak pemerintah yang mengelola dan menjadi salah satu penyebab para masyarakat lain yang bekerja mencari batu warna di wilayah wisata yang membuat keindahan Pantai menjadi rusak dan tidak adanya daya tarik.

### **Adanya Dampak Positif dan Dampak negatif terhadap pengelolaan Destinasi wisata Desa Spaha.**

Pengelolaan wisata Pantai Kolbano adalah sebuah kawasan yang menjadi pembatas antara wilayah daratan dan wilayah lautan, Pantai biasanya memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu pemanfaatan wilayah Pantai yang dilakukan oleh masyarakat adalah menjadikan sebagai objek wisata, seperti pantai tersebut memiliki keindahan alam tersendiri. Wisata Pantai juga sebagai objek wisata yang sangat meningkatkan kesejahteraan bagi warga sekitar objek wisata membuka lapangan pekerjaan dan bisa menyumbang devisa bagi Negara lain. Adapun dampak positif terkait pengelolaan destinasi wisata Pantai Kolbano dijadikan yang sebagai objek wisata.

#### **1. Dampak positif**

- a. Dapat menjadikan sumber mata pencaharian masyarakat Desa.

Desa Spaha memiliki mata pencaharian yang sangat bagus dari hasil pariwisata untuk menambah kebutuhan ekonomi dan memperkuat ekonomi lokal artinya sumber mata pencaharian dapat meningkatkan peluang bisnis dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Spaha.

- b. Membuka lapangan kerja baru di bidang pariwisata.

Dengan membuka lapangan kerja baru di bidang pariwisata, masyarakat lokal dapat memperoleh penghasilan tambahan dan meningkatkan taraf hidup. Pariwisata menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat karena berbagai layanan dan kegiatan yang didukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- c. Meningkatkan usaha kuliner dan souvenir.

Desa Spaha memiliki banyak sekali ide yang bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan usaha kuliner dan souvenir, bidang kuliner atau usaha makanan menjadi bidang yang memiliki peluang besar karena makanan adalah kebutuhan pokok setiap manusia. Usaha pangan juga usaha yang sederhana dan mudah dilakukan namun mendatangkan keuntungan yang besar agar masyarakat setempat bisa lebih mengetahui pentingnya memanfaatkan hasil pertanian dan pariwisata dengan baik. Usaha souvenir juga sangat penting dalam meningkatkan kreativitas dan kualitas produk agar dapat menarik lebih banyak pelanggan.

d. Mempromosikan wisata dan kebudayaan masyarakat Desa.

Mempromosikan wisata adalah salah satu cara yang menjadi perhatian penting banyak orang agar mereka lebih mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di Pantai Kolbano dengan mempergunakan media sosial secara baik seperti Instagram, facebook, Twitter, dan Tit-tok untuk membuat konten menarik dan juga pembuatan brosur, website dan papan reklame untuk menyebarkan informasi destinasi wisata. Pemberdayaan masyarakat yaitu berkolaborasi dengan masyarakat Desa untuk mengidentifikasi dan mempromosikan aset budaya unik dan penting untuk menghormati tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat.

e. Mensejahterakan kehidupan masyarakat Desa.

Dengan adanya pariwisata, banyak orang dapat bekerja di sektor pariwisata seperti di bidang usaha kuliner, pertanian dan jasa transportasi. Hal ini akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu pariwisata juga dapat meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak dan pendapatan dari wisatawan asing. Dan juga peningkatan pendidikan dan kesehatan harus lebih di utamakan.

f. Meningkatkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan destinasi wisata.

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk pengelolaan destinasi wisata yang sukses. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya tarik wisata agar lebih memberikan pengalaman positif bagi wisatawan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan adanya perencanaan yang matang diperlukan untuk menentukan kebutuhan infrastruktur yang tepat berdasarkan potensi wisata dan target wisatawan.

Pengembangan sumber daya manusia harus adanya pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk mengelola dan memelihara infrastruktur.

Berkaitan dengan Dampak positif terkait peningkatan pengelolaan destinasi wisata maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku kepala Desa Spaha menyatakan bahwa:

*“wisata ini berada di tengah-tengah kami sebagai pemerintah jadi untuk proses pengembangan kami tetap bekerja sama walaupun dari pihak masyarakat yang mengelola wisata tersebut menolak kerja sama dari kami untuk saling support dalam hal memposting semua aktifitas pantai kolbano ke media sosial agar lebih di kenal banyak orang.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pantai Kolbano ini merupakan salah satu wisata yang sudah dikenal oleh semua orang dan juga sangat memiliki pemandangan yang indah, maka dari itu pemerintah setempat mempergunakan media sosial dengan baik untuk dapat mempromosikan tempat wisata dan membantu tempat wisata dalam berinteraksi dengan para pengunjung agar semua orang lebih mengenal dan mengetahui semua aktivitas masyarakat Desa Spaha yang berada pada wisata Pantai Kolbano walaupun dari pihak masyarakat yang mengelola wisata menolak

kerja sama tetapi pemerintah tetap menjalankan tanggungjawab mereka dalam meningkatkan destinasi wisata pantai yang berkelanjutan.

## 2. Dampak Negatif

### 1. Kurangnya Sumber daya manusia(SDM) yang belum memadai.

Sumber daya manusia memiliki dampak negatif yang luas yang dilihat dari kurangnya kesenjangan keterampilan yang artinya pekerja pariwisata memiliki keterampilan dasar. Tetapi kurangnya pelatihan khusus menyebabkan masyarakat Desa sangat sulit dalam memenuhi kebutuhan industri yang semakin kompleks dan Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya peran sumber daya manusia dalam industri pariwisata.

### 2. Kurangnya perubahan sosial dan budaya

Kurangnya perubahan sosial dan budaya dapat merujuk pada kondisi dimana masyarakat mengalami penurunan terkait perkembangan destinasi wisata dan juga cara hidup, nilai-nilai serta interaksi sosial masyarakat setempat akibat pengaruh pariwisata. Perbedaan nilai dan gaya hidup antara wisatawan dan masyarakat setempat bisa menimbulkan konflik yang bisa memicu perubahan nilai dan perilaku.

### 3. Kurangnya peran pemerintah di bidang pariwisata.

Kurangnya peran pemerintah di bidang pariwisata dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti kurangnya pendanaan, infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya koordinasi antara pemerintah dan swasta.

Kurangnya pendanaan maka pemerintah masih kendala terkait bagaimana cara untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata, seperti pembangunan infrastruktur dan juga pemerintah masih kurang mengalokasikan anggaran dalam peningkatan potensi pariwisata. serta sarana prasarana yang belum memadai ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah. Dan juga Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengelolaan pariwisata dalam promosi wisata Desa.

### 4. Adanya penolakan dari masyarakat yang mengelola destinasi wisata.

Penolakan pengelolaan destinasi wisata Kolbano oleh pihak masyarakat yang dimana mereka mengklaim tanah itu milik mereka. jadi, semua aktivitas dan perubahan yang mereka kerjakan itu semua tanpa campur tangannya pemerintah Desa setempat. Jadi dari pemerintah masih mencari solusi agar bisa menjalin kerja sama untuk lebih meningkatkan Destinasi wisata yang bermanfaat bagi semua orang.

Peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa tata kelola destinasi wisata Pantai batu warna di Desa Spaha Masih sangat minim yang dimaksud bahwa kurangnya perhatian dari pemerintah dan juga sampai sekarang pengelolaannya masih mengalami kendala dalam hal anggaran, maka dari itu pemerintah akan berusaha untuk menjalin kerja sama yang baik agar bisa melanjutkan Tetapi juga merupakan kewajiban bersama masyarakat lokal, perilaku

bisnis dan pengunjung. Dengan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial dan manfaat ekonomi destinasi yang dapat menjadi warisan berharga yang tetap melestarikan untuk generasi akan mendatang dan juga masyarakat di Desa.

Dampak positif diwujudkan jika tata kelola destinasi wisata Pantai Kolbano dilakukan secara terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya yang bisa menjalin kerja sama dalam peningkatan pengelolaan Destinasi wisata yang berorientasi dan keberlanjutan dengan melihat perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan. Dan untuk masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk dapat berperan aktif dalam sektor pertanian sedangkan pemerintah dan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan manfaat ekonomi dari pariwisata dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Dengan kekurangan dari destinasi wisata Kolbano maka pemerintah daerah Timur Tengah Selatan harus berperan aktif dalam mendukung pengelolaan pariwisata di Pantai Kolbano. Informasi spesifik mengenai dukungan pemerintah daerah masih sangat terbatas tetapi sebagai masyarakat harus tetap bertindak dalam melanjutkan kelestarian wisata.

### **Peran Masyarakat Lokal dalam pengembangan Destinasi Wisata**

Peran masyarakat dalam pengembangan tata kelola pengelolaan destinasi wisata Pantai Kolbano Timur Tengah Selatan sangatlah penting, bahkan bisa dibilang menjadi salah satu kunci keberhasilan. Menjadi pelaku utama dan pemilik destinasi yang dimaksud masyarakat lokal harus menjaga wilayah Pantai tersebut agar mereka menambah pengetahuan yang mendalam tentang budaya, sejarah dan alam setempat serta berperan aktif dalam pengelolaan.

Masyarakat lokal di Pantai Kolbano memiliki peran penting dalam meningkatkan pengelolaan destinasi wisata di wilayah Pantai wisata. Untuk itu harus adanya edukasi dan pelatihan mengenai pariwisata, seperti pengelolaan infrastruktur dan kerajinan tangan melalui batu warna di Desa Spaha. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah, LSM atau organisasi pariwisata.

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat lokal maka dapat dilihat dari hasil wawancara oleh Bapak Faslat P.Y Sabuna selaku Kepala Desa Spaha menyatakan bahwa: *“adik,, yang namanya masyarakat lokal ini yaitu masyarakat yang menetap di Desa Spaha, nah berkaitan dengan bagaimana masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata ini maka harus adanya kolaborasi antar pihak masyarakat dan pihak yang mengelola yang artinya menciptakan wisata yang bersatu dengan kami sebagai pemerintah agar tetap memperhatikan kesuksesan wisata ini.”*

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Efen Tlonaen selaku masyarakat Desa Spaha menyatakan bahwa :

*“baik kaka kami sebagai masyarakat di sini sangat mendukung pengelolaan wisata yang berkeanjutan nah, saya melihat bahwa keterlibatan kami masyarakat masih sangat berkurang sekitar 75% kenapa saya berbicara begini karena proses perkembangan tanpa campur tangan pemerintah tidak adanya keterlibatan maka perkembangan destinasi wisata sampai tahun ini 2024 belum ada perubahan sama sekali.”*

Pendapat lain juga disampaikan oleh Bapak Mateos Kase selaku Tua adat di Desa Spaha menyatakan Bahwa:

*“adik saya sebagai Tua adat di Desa ini, mau berpendapat bahwa masyarakat yang mengelola ini sangat tidak di andalkan karena mereka mau mengelola sendiri jadi perkembangan sekarang belum memadai dan tidak tahu bagaimana fasilitasnya, pembangunan, serta promosi wisata.*

Berdasarkan hasil dari ke tiga narasumber di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat lokal memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah destinasi wisata yang didukung dengan adanya Pelaku utama, penjaga budaya dan tradisi, sumber daya manusia, keuntungan ekonomi , kesadaran lingkungan, tantangan dan solusi dari faktor pendukung tersebut maka harus diterapkan secara terpadu dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar mendapatkan manfaat yang adil dari pariwisata. Terlibat aktif dalam pengembangan potensi wisata untuk dijadikan objek wisata maka harus menggali potensi pariwisata yang ada dan menerima manfaat dari pengembangan pariwisata serta memberikan kontribusi penuh baik sumbangan pemikiran, dan tenaga yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata .

Proses pengembangan destinasi wisata secara langsung menjadi penting hal ini didasarkan kepada alasan sebagai berikut :

Pertama, mengakomodasi keinginan dan tuntutan masyarakat, pengembangan destinasi wisata harus didasarkan atas adanya keinginan masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di Desanya sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat ditujukan untuk memastikan bahwa pengembangan Desa wisata sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat. Kedua, Membangun partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan destinasi wisata serta adanya keterlibatan masyarakat ditujukan untuk menggugah rasa kepemilikan masyarakat terhadap potensi Desa wisata yang dikembangkan sehingga masyarakat memiliki kehendak untuk terlibat dalam pengelolaan wisata. ketiga, sarana bagi masyarakat untuk menumbuhkan dan memperkuat kelembagaan masyarakat yang ada, hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat secara bersama-sama dalam mengembangkan destinasi wisata Pantai dengan meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam pengembangan potensi yang dimilikinya, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kelembagaan masyarakat yang kuat.

Penyelenggaraan Desa wisata merupakan proses untuk mewujudkan tujuan pengembangan Desa wisata, dalam proses ini masyarakat dilibatkan baik sebagai

penyelenggara maupun sebagai penerima manfaat. Peran masyarakat sebagai penyelenggara merupakan hak masyarakat untuk mengelola Desa wisata, keberlangsungan dan keberlanjutan Desa wisata menjadi hak masyarakat, sedangkan peran masyarakat sebagai penerima manfaat ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini menjadi penting agar Peran masyarakat harus menjadi pihak pertama yang diuntungkan dalam pengembangan Desa wisata. Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan Desa wisata menjadi penting untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah bisa dicapai atau belum, masyarakat memiliki hak untuk menilai keberhasilan tersebut harus dari proses awal masyarakat sudah dilibatkan sehingga dalam proses penilaian terhadap penyelenggaraan Desa wisata, masyarakat jauh lebih mengetahui dibanding dengan pihak lainnya. Selain itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Desa wisata yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkatkan kapasitas masyarakat serta menciptakan akuntabilitas dalam keseluruhan proses penyelenggaraan destinasi wisata.

Dari pemahaman di atas, maka pengembangan destinasi wisata yang melibatkan masyarakat sejak dari awal sampai dengan akhir merupakan jawaban akan adanya tuntutan untuk menghadirkan masyarakat sebagai pemilik potensi Destinasi wisata yang berhak mengelola dan menerima manfaat dari pengembangan wisata, sehingga keberadaan Desa wisata mampu menumbuhkan rasa kepemilikan, memperkuat kelembagaan sampai dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian tentang tata kelola wisata Pantai batu warna di Kolbano (studi pengelolaan di Desa Spaha Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengan Selatan) penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki banyak objek wisata. Termasuk Pantai Kolbano, di sana banyak keeksotisan alam yang menarik. Namun sayang, objek wisata ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh karena itu para stakeholder segera mengambil kebijakan agar Pantai Kolbano dapat menjadi tempat wisata dan banyak wisatawan yang datang berkunjung karena adanya keindahan batu yang berwarna-warni. Hal ini karena pengelolaan pariwisata Pantai Kolbano itu pengelolaannya masih berjalan secara sepihak, karena wisata Pantai batu Kolbano ini berdekatan langsung dengan beberapa rumah masyarakat yang ada dipinggiran Pantai. Pemerintah setempat tidak mampu melakukan intervensi secara penuh karena dari sisi perencanaan masih sangat lemah oleh pihak pemerintah untuk melakukan intervensi di dalam pengelolaan pariwisata

- a. Peran pemerintah Desa dalam tata kelola destinasi wisata Pantai Kolbano sangat penting untuk mencapai tujuan dalam pengembangan wisata yang berkelanjutan.
- b. Perencanaan dan pengemabangan pemerintah Desa berkembang dalam merumuskan rencana pengelolaan wisata Pantai Kolbano. Pemerintah Desa juga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti dinas pariwisata dan kebudayaan untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan.

- c. Adanya peningkatan pengelolaan destinasi wisata maka pemerintah Desa bertanggung jawab untuk mengelola destinasi wisata secara efisien dan efektif. Yang meliputi pemeliharaan fasilitas, pengaturan akses dan pegadaan sumber daya yang dibutuhkan. Pemerintah Desa juga dapat membentuk badan pengelolaan wisata atau melibatkan masyarakat melalui kelompok sadar wisata
- d. Agar tata kelola pengembangan destinasi wisata Pantai Kolbano di Desa Spaha, dapat berjalan dengan baik, maka aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata harus menjalankan prinsip-prinsip Good Governance sehingga berimplikasi terhadap sosial culture. Prinsip-prinsip Good Governance yang dimaksud adalah transparansi, akuntabilitas dan masyarakat lokal.
- e. Masyarakat lokal semua harus mendukung perkembangan keberlanjutan destinasi wisata maka harus adanya partisipasi untuk bisa lebih memudahkan proses berjalannya pengelolaan tersebut.
- f. Dalam konteks tata kelola wisata Desa maka harus dimanfaatkan pemanfaatan teknologi yang artinya semua website dan media sosial masyarakat Desa Spaha harus memiliki fungsi secara baik-baik agar bisa di promosikan, maka dari itu peningkatan tata kelola destinasi wisata Desa akan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bhayangkara Rhama. Ph. D. 2020. *Tata Kelola Destinasi Wisata Dan Peraturan perundangan Parawisata*. Fauziah Eddyono, 2021. *Pengelolaan Destinasi Pariwisata*, Jawa Timur.
- Heinz Ealau dan Kenneth Prewitt, 1973 dalam Leo Agustino (2006:6) dalam perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan tetap.
- I Gust Bagus Rai Utama, (2015), *Pengantar industri pariwisata*. Ed. I,Cet.- I Yogyakarta.
- Kusudianto, Hadinoto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI-Press.
- Laksmi dkk. (2008 : 43). Tujuan Pengoorganisasian Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Mohammad Ridwan, Windra Aini, (2019), *Tentang perencanaan pengembangan daerah Tujuan Pariwisata*.
- Riant Nugroho, Firre An Suprpto, SAP.,M.Pd, (2021), *Membangun Desa Wisata*.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata: Konsep Dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Medi
- Yuningsih, Nining, 2005. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

### Skripsi

- MariaB. Wede. ( 2017), *Pengembangan Wisata Pantai Kolbano Berdasarkan persepsi Stakeholder Di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan*.
- Setiawan, Ari. 2015. *Skripsi: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan objek wisata pantai tanjung bira di Kabupaten bulukumba*. Makassar. Administrasi Negara
- Nurfadilah. (2018). *Peran pemerintah dalam pengelolaan objek wisata alam Lewaja di kabupaten Enrekang*. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/467-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/467-Full_Text.pdf)

Rifaldi Bayu Satryo. (2021). Tata kelola destinasi wisata berbasis komunitas di gunung api purba Desa Nglanggeran( Studi pada destinasi wisata gunung api purba Desa Nglanggeran, patuk gunung kidul 2019-2020).

#### **Jurnal**

Abs Kesaulyan dkk. (2007). *Pengelolaan pertambangan batu warna di kecamatan kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan*.

Aldi Herindra Lasso. (2020). *Peran pemerintah Desa keditan dalam pembangunan parawisata*.

<https://ejournal.uksw.edu/kritis/article/download/4403/1628>

Maria C. B Manteiro (2023), Pengembangan Parawisata ( Community Based Tourism) Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Vol. 8 No. 2.

Maristiana Ayu, Niar Azriya, Komang Tri Windari, Nuzleha Nuzleha. (2020), Tata Kelola dan Administrasi BUMDes. Jurnal abdi masyarakat saburai(Jams) 1(01), 1-10.

Narendra, A.N.; Habsari, S.K.; Ardianto, D.T. (2019). Kepemilikan serta pembentukan modal Sosial oleh wisatwan dalam memilih house of Sampoerna sebagai daya tarik wisata.Jurnal Pariwisata Pesona, 4(1).

Neny Wahyuni dan Nursius Neno. (2016). *Strategi pengembangan infrastruktur objek wisata dipantai kolbano Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Vol. 1,No.1, p. 66-70.

Prastika, Y.; Sunarta, I.N. 2018. " Studi Perkembangan Dan Pengaruhnya Pada Lingkungan Fisik Di Pantai Bulangan, Desa Ungasan, Jimbran. Jurnal Destinasi Wisata Vol. 6 No. 1, 2018. Universitas Udayana, Fakultas Pariwisata, Program Studi S1 Destinasi Pariwisata.

Putu Indah Rachmawati. (2020). *Strategi pengembangan dan tata kelola kepariwisataan kota singaraja*. <https://ejurnal.bulelengkab.go.id/index.php/saraswati/article/view/16>

Rusyidi B; Fedryansah M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 1 No. 3. Universitas Padjadjaran, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial.

Sinaga, R. K. (2016). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA.

Wardianto & M Baiquni.2010. Perencanaan & pembangunan pariwisata. Bandung: Lubuk agung.

Yarisetouw, Benyamin. 2012.Strategi perencanaan Desa Tablanusu Distrik depapre sebagai destinasi pariwisata di kabupaten jayapura provisi papua. (tesis). Denpasar. Universitas Undayana.

#### **Undang-undang**

Indonesia. UU, No. 10,Tahun 2009, Tentang kepariwisataan.

Indonesia. UU, No. 32,Tahun 2004, UU,No.33,Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.